

ANALISIS EKUITAS PEMERINTAH PUSAT

Yulistria Anggraini^{1*}, Muhammad Irfan Rizaldi², Haryo Adik³

^{1,2,3}Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta, Indonesia

Email: yulistria.anggraini@kemenkeu.go.id

irfan.rizaldi@kemenkeu.go.id

haryoadik@kemenkeu.go.id

Abstrak

Penelitian ini disusun untuk menganalisis penyebab tren menurunnya ekuitas pemerintah pusat dan selanjutnya mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah dalam mengantisipasi penurunan ekuitas tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan menganalisis tren pada laporan keuangan serta membandingkan dengan kebijakan dan peraturan yang terjadi pada tahun pelaporan sehingga belum dapat menyajikan informasi lebih jauh mengenai alasan atau pertimbangan Pemerintah terkait suatu kebijakan yang dapat menaikkan/menurunkan ekuitas secara signifikan. Hasil, Kebijakan ini melibatkan strategi perumusan dengan prinsip kehati-hatian dan terencana, terutama dalam kebijakan fiskal jangka menengah. Dampaknya mencakup peningkatan pengeluaran pembiayaan untuk menutup defisit anggaran, terutama pada belanja operasional.

Kata Kunci: Ekuitas, Kebijakan Ekuitas Fiskal, Keuangan

Abstract

This study is prepared to analyze the causes of the declining trend in central government equity and further identify steps that the Government can take in anticipating the decline in equity. This research was conducted using descriptive analysis methods by analyzing trends in financial statements and comparing with policies and regulations that occurred in the reporting year so that it could not present further information about the reasons or considerations of the Government related to a policy that could increase / decrease equity significantly. As a result, this policy involves a formulation strategy with prudential and planned principles, especially in medium-term fiscal policy. The impact includes an increase in financing expenditures to cover the budget deficit, especially in operational expenditures.

Keywords: Equity, Fiscal Equity Policy, Finance.

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lestari, Bagia, & Jana, 2018);(Kautsa,

How to cite:	Yulistria Anggraini, Muhammad Irfan Rizaldi, Haryo Adik (2024) Analisis Ekuitas Pemerintah Pusat, (5) 2
---------------------	---

E-ISSN:	2722-5356
----------------	-----------

Published by:	Ridwan Institute
----------------------	------------------

2022). Dalam pengelolaan keuangan negara, pencapaian tujuan negara berupa kemakmuran rakyat harus diutamakan. Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam upayanya mencapai tujuan bernegara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Yuniza & SH, 2021).

Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara adalah Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Republik Indonesia, 2003);(Keuangan, 2007). Setiap tahun Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

LKPP disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). LKPP pertama kali disusun pada tahun 2004 dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Di dalam LKPP berbasis kas terdapat beberapa laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sejak tahun 2015 Pemerintah mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh dalam penyusunan LKPP sehingga LKPP yang disusun terdapat beberapa tambahan jenis laporan keuangan yaitu Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagai bentuk implementasi akuntansi berbasis akrual secara penuh (Purwianti & Zaman, 2017). Selain penambahan jenis laporan, akuntansi berbasis akrual juga mencatat setiap transaksi saat terjadinya transaksi tersebut walaupun kas belum diterima ataupun belum keluar (Herwiyanti, Sukirman, & Aziz, 2017).

Sejak pertama kali disusun tahun 2004, LKPP terus mengalami perkembangan yang dinamis, baik dari segi nilai keuangan maupun kebijakan akuntansi yang diterapkan. Perkembangan dari segi nilai keuangan tidak terlepas dari tren APBN yang terus meningkat, hal ini ditunjukkan oleh Realisasi Pendapatan dan Belanja pada tahun 2004 masing-masing sebesar Rp403,37 Triliun dan Rp427,18 Triliun menjadi Rp2.635,84 dan Rp3.096,26 Triliun pada tahun 2022.

Sementara itu, pada tiga tahun terakhir ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah mengalami tren penurunan. Pada tahun 2019 ekuitas Pemerintah adalah sebesar Rp5.127,31 triliun namun pada tahun 2020 ekuitas pemerintah menurun sebesar 12,76% menjadi Rp4.473,19 triliun. Pada tahun 2021 ekuitas pemerintah mengalami penurunan sebesar 12,45% menjadi Rp3.916,34 triliun. Selanjutnya pada tahun 2022 penurunan ekuitas bertambah dibandingkan penurunan tahun 2021 yaitu sebesar 13,06%, dari Rp3.916,34 triliun menjadi Rp3.404,89 triliun.

Ekuitas menunjukkan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah (Kuspriyono, 2016);(Suwandi, 2022). Tren penurunan ekuitas yang terjadi mengindikasikan bahwa kekayaan pemerintah pusat terus menurun setiap tahunnya sehingga perlu mendapatkan perhatian dan diperlukan analisis untuk mengidentifikasi penyebab tren penurunan ekuitas dan menentukan langkah yang dapat ditempuh Pemerintah untuk mengantisipasi tren penurunan ekuitas tersebut (Adyanti, 2020);(Barry, 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini disusun untuk menganalisis penyebab tren menurunnya ekuitas pemerintah pusat dan selanjutnya mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah dalam mengantisipasi penurunan ekuitas tersebut. Analisis ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait laporan keuangan pemerintah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan menganalisis tren pada laporan keuangan serta membandingkan dengan kebijakan dan peraturan yang terjadi pada tahun pelaporan sehingga belum dapat menyajikan informasi lebih jauh mengenai alasan atau pertimbangan Pemerintah terkait suatu kebijakan yang dapat menaikkan/menurunkan ekuitas secara signifikan (Sugiyono, 2017). Rekomendasi untuk kajian berikutnya agar dapat dilakukan wawancara terhadap pengambil kebijakan di Pemerintahan untuk dapat menggali lebih dalam mengenai pertimbangan dalam penerapan suatu kebijakan.

Selain itu dapat juga dilakukan kajian dengan mengkaji pengaruh penurunan ekuitas pemerintah terhadap indikator-indikator kesejahteraan seperti PDB, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, inflasi, IPM, Gini Ratio, dll sehingga dapat dianalisis apakah terdapat risiko atau dampak yang nyata dari penurunan ekuitas pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Nilai Ekuitas Pemerintah

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah (Mole, 2015). Pada awal penyusunan LKPP tahun 2004 hingga 2006, ekuitas Pemerintah tercatat bernilai negatif yang artinya jumlah aset pemerintah lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban. Hal tersebut dikarenakan aset pemerintah di antaranya aset tetap belum seluruhnya tercatat dan sebagian besar dengan nilai yang tidak seharusnya atau bahkan tidak bernilai (Ditjen Perbendaharaan, 2016). Untuk itu diperlukan pencatatan aset pemerintah secara akurat untuk keseluruhan aset yang dimiliki dan dikuasai pemerintah pusat sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemerintah pusat telah melakukan upaya yang terstruktur dan terencana untuk membenahi pencatatan aset, di antaranya melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian kembali atas seluruh aset tetap pemerintah pusat. Kegiatan inventarisasi dan penilaian atas seluruh aset tetap pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Pusat tahun 2007 sehingga nilai aset tetap yang disajikan di neraca menjadi lebih handal dan akurat. Inventarisasi dan penilaian kembali tersebut telah secara nyata menunjukkan perbaikan yang fundamental dalam penyajian nilai aset tetap pemerintah.

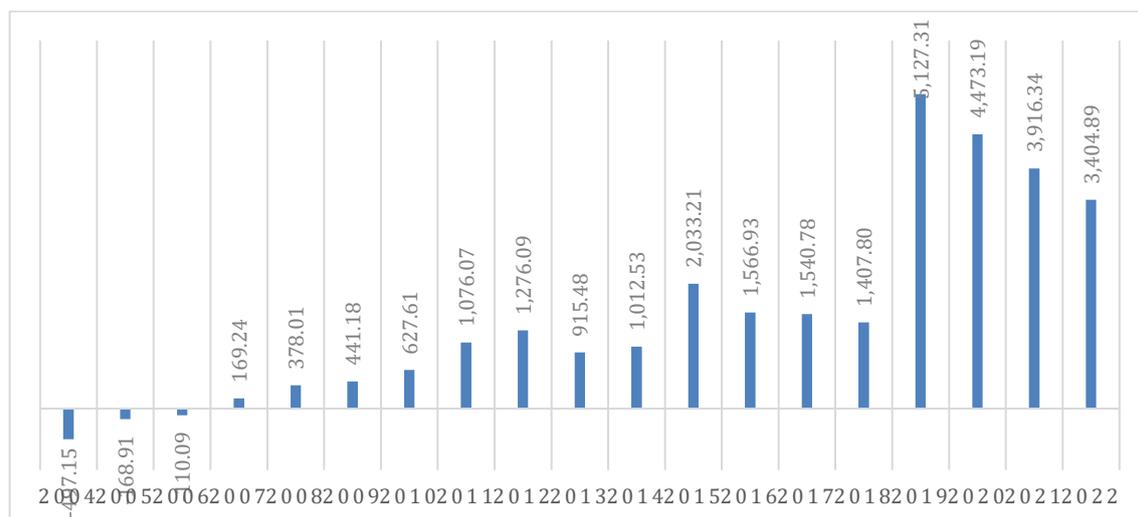
Pemerintah juga membenahi pencatatan atas aset lancar pemerintah berupa kas yang meliputi kas di Bendahara Umum Negara, kas di Bendahara Pengeluaran, kas di Bendahara Penerimaan, dan kas di rekening pemerintah lainnya. Perbaikan ini di antaranya dilakukan dengan penertiban seluruh rekening pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh rekening telah dilaporkan oleh pemerintah dan setiap rekening dari instansi pemerintah pusat telah tertib administrasi (perizinan, penggunaan, dan penutupan rekening), dan saldo yang dilaporkan telah akurat. Selain itu, Pemerintah juga melakukan pembenahan lain terkait pencatatan piutang, investasi, aset tak berwujud, dan aset lain-lain.

Upaya-upaya perbaikan tersebut telah membuahkan hasil positif dimana penyajian aset pemerintah semakin baik dan nilai aset pemerintah menunjukkan nilai yang sebenarnya (Ditjen Perbendaharaan, 2016). Hal ini membawa dampak yang sangat baik dalam pengelolaan aset dimana nilai aset pemerintah menjadi meningkat sehingga ekuitas pemerintah yang semula negatif menjadi positif dan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2017 Pemerintah kembali melakukan revaluasi atas aset-aset yang dimiliki Pemerintah. Hasil dari revaluasi tersebut atas persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disajikan dalam LKPP Tahun 2019 sehingga pada tahun 2019 nilai ekuitas Pemerintah naik signifikan sebagai hasil dari penilaian kembali atas aset-aset tetap yang dimiliki Pemerintah.

Perkembangan ekuitas Pemerintah Pusat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2022 tergambar pada Grafik 1. Dari grafik tersebut terlihat bahwa setelah selama tiga tahun ekuitas pemerintah bernilai negatif sebagai akibat belum sempurnanya pencatatan dan penilaian aset pemerintah, ekuitas pemerintah perlahan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2007 seiring dengan proses inventarisasi dan penilaian atas seluruh aset tetap Pemerintah. Pada tahun 2011 ekuitas pemerintah kembali naik signifikan karena Pemerintah menerapkan perubahan kebijakan akuntansi dari kebijakan akuntansi Basis Kas menjadi Kas Menuju Akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010. Pada tahun tersebut aset tetap mengalami pertumbuhan 32,4% dari tahun sebelumnya dan ekuitas mengalami pertumbuhan sebesar 71% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2013 ekuitas pemerintah sempat mengalami penurunan yang disebabkan oleh naiknya kewajiban pemerintah yang cukup signifikan, naik 22,96% dibandingkan tahun 2012, sedangkan aset hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,92%. Naiknya kewajiban pemerintah ini di antaranya disebabkan meningkatnya Surat Berharga Negara yang dikeluarkan Pemerintah dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sehingga pada akhirnya nilai ekuitas pemerintah menjadi turun.



Grafik 1 Ekuitas Pemerintah Pusat 2004 – 2022 (triliun Rupiah)

sumber: LKPP 2004 – 2022 (diolah)

Pada tahun 2015, nilai ekuitas pemerintah meningkat hingga 100,80%. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh perubahan basis akuntansi dalam penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh. Perubahan basis akuntansi yang digunakan ini berpengaruh pada pengakuan hak-hak pemerintah yang tercatat dalam aset seperti pengakuan piutang dan juga berpengaruh pada pengakuan kewajiban-kewajiban pemerintah.

Pada tahun 2015 aset pemerintah meningkat sebesar 41,32% terutama pada Penyertaan Modal Pemerintah dan Piutang Jangka Panjang, sedangkan kewajiban meningkat sebesar 20,53% terutama pada Kewajiban Jangka Panjang. Selanjutnya, pada tahun 2017 Pemerintah melaksanakan penilaian kembali atas aset-aset pemerintah/Barang Milik Negara (BMN) sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN ini telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahun 2018, namun baru disetujui oleh BPK untuk dapat disajikan di dalam LKPP pada tahun 2019 sehingga pada tahun 2019 terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada ekuitas Pemerintah sebagai dampak dari peningkatan nilai aset hasil dari penilaian kembali. Ekuitas Pemerintah naik sebesar 264,21% menjadi Rp5.127,31 triliun dari sebelumnya tahun 2018 sebesar Rp1.407,80 triliun.

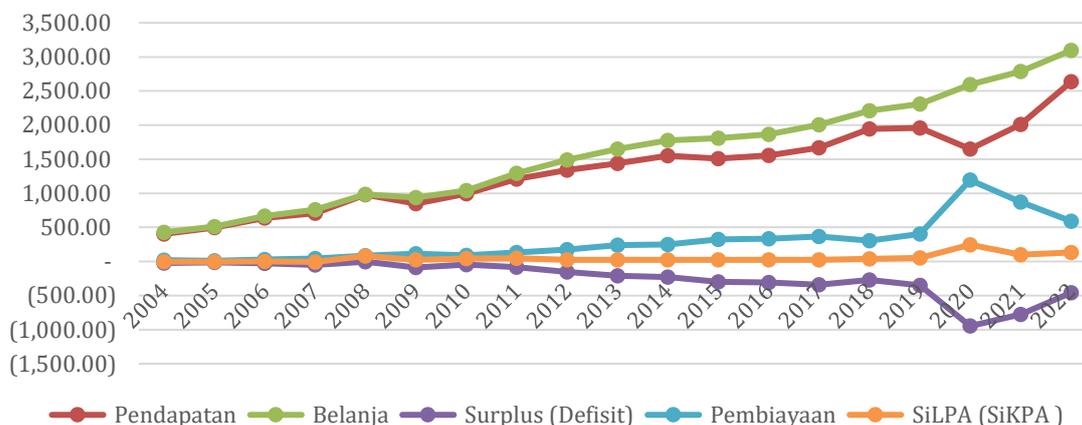
Namun sejak tahun 2019 hingga 2022, ekuitas Pemerintah terlihat mengalami tren penurunan. Pada tahun 2019 ekuitas Pemerintah adalah sebesar Rp5.127,31 triliun dan pada tahun 2020 ekuitas Pemerintah menurun sebesar 12,76% menjadi Rp4.473,19 triliun. Pada tahun 2021 ekuitas Pemerintah juga masih mengalami penurunan sebesar 12,45% menjadi Rp3.916,34 triliun, walaupun penurunannya lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2022 tren penurunan ekuitas kembali berlanjut dimana ekuitas turun dari Rp3.916,34 triliun menjadi Rp3.404,89 triliun. Ekuitas yang terus menurun ini mencerminkan nilai kekayaan bersih Pemerintah yang semakin berkurang setiap tahunnya.

Jika diperhatikan kembali data pada Grafik 1, tren penurunan ini tidak hanya terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2022 saja. Pada tahun 2015 hingga 2018 sebelum dilakukan penilaian kembali aset, ekuitas pemerintah juga mengalami tren penurunan. Pada tahun 2016 ekuitas pemerintah turun cukup signifikan sebesar 22,93% dari Rp2.033,21 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp1.566,93 triliun pada tahun 2016. Penurunan ini juga terjadi pada tahun 2017 dan 2018 dimana ekuitas pemerintah turun sebesar 1,67% dan 8,63%.

Analisis Ekuitas dengan Pendekatan LRA

Selama kurun waktu 2004 s.d. 2022 realisasi APBN mengalami defisit, hal ini tidak terlepas dari kebijakan APBN ekspansif yang diambil oleh pemerintah. Strategi perumusan kebijakan ekspansif/kontraktif dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan terencana melalui perumusan kebijakan fiskal jangka menengah (Putera, 2016). Esensi strategi perumusan kebijakan fiskal jangka menengah adalah untuk mempengaruhi perekonomian yang difokuskan pada 3 (tiga) hal pokok Siswajanthi (2024) yaitu: (i) menjaga stabilitas makro (kesimbangan internal dan eksternal) dan mendorong

pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi dan berkelanjutan; (ii) mendistribusi pendapatan dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dan pengurangan kesenjangan serta perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat; dan (iii) mendorong penyediaan barang publik dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan publik (Pusat Kebijakan APBN, 2015).



Grafik 2 Realisasi APBN 2004 – 2022 (triliun Rupiah)

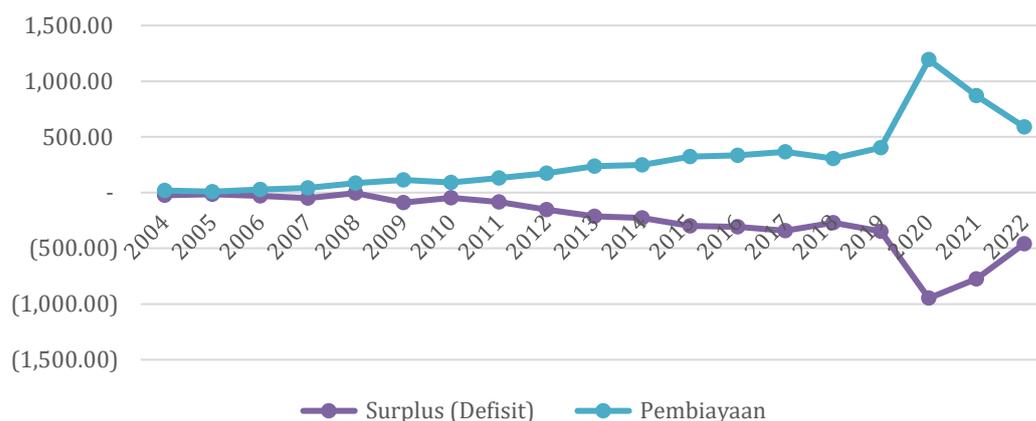
Sumber: LKPP 2004 – 2022 (diolah)

Tabel 1 Realisasi APBN Tahun 2004 – 2022 (triliun Rupiah)

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pendapatan	403,37	495,22	637,99	707,81	981,61	848,76	995,27	1.210,60	1.338,31	1.438,89
Belanja	427,18	509,63	667,13	757,65	985,73	937,38	1.042,12	1.295,00	1.491,41	1.650,56
Surplus (Defisit)	(23,81)	(14,41)	(29,14)	(49,84)	(4,12)	(88,62)	(46,85)	(84,40)	(153,10)	(211,67)
Pembiayaan	20,80	8,87	29,42	42,46	84,07	112,58	91,55	130,95	174,96	237,39
SiLPA (SiKPA)	(3,0)	(5,54)	0,27	(7,39)	79,95	23,96	44,71	46,55	21,86	25,72
Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Pendapatan	1.550,49	1.508,02	1.555,93	1.666,38	1.943,67	1.960,63	1.647,78	2.011,35	2.635,84	
Belanja	1.777,18	1.806,52	1.864,28	2.007,35	2.213,12	2.309,29	2.595,48	2.786,41	3.096,26	
Surplus (Defisit)	(226,69)	(298,49)	(308,34)	(340,98)	(269,44)	(348,65)	(947,70)	(775,06)	(460,42)	
Pembiayaan	248,89	323,11	334,50	366,62	305,69	402,05	1.193,29	871,72	590,98	
SiLPA (SiKPA)	22,20	24,61	26,16	25,65	36,25	53,40	245,60	96,66	130,56	

sumber: LKPP 2004 – 2022 (diolah)

Jika dicermati, tren defisit LRA mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana tergambar pada Grafik 3. Tren pelebaran defisit APBN tentunya berimplikasi pada peningkatan pembiayaan yang harus disediakan untuk menutup defisit tersebut. Dampak atas peningkatan pembiayaan tersebut pada Laporan Keuangan adalah peningkatan jumlah kewajiban pemerintah yang timbul akibat adanya penarikan pinjaman untuk membiayai belanja pemerintah (Tholhah & Halim, 2018). Sesuai teori dimana ekuitas merupakan hasil dari nilai aset dikurangi dengan total kewajiban, maka peningkatan nilai pembiayaan dan kewajiban Pemerintah maka akan berdampak pada penurunan nilai ekuitas Pemerintah.



Grafik 3 Defisit APBN dan Pembiayaan 2004 – 2022 (triliun Rupiah)
sumber: LKPP 2004 – 2022 (diolah)

Analisis Ekuitas dengan Pendekatan LO

Sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan negara, Indonesia menerapkan kebijakan anggaran defisit. Setiap tahun belanja negara dibuat ekspansif dan terus meningkat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian. Selain tercermin di LRA, kebijakan ini juga dapat dilihat pada Laporan Operasional Pemerintah dimana nilai akhir pada LO menunjukkan nilai negatif atau defisit setiap tahunnya. Nilai Defisit-LO ini merupakan pos yang paling signifikan berpengaruh terhadap penurunan ekuitas pemerintah dan cenderung mengalami peningkatan terutama pada tahun 2020 dan 2021 ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Tabel 2 Defisit LO 2018 – 2022

2018	(225.730.103.236.335)
2019	(249.226.639.571.213)
2020	(872.618.264.239.235)
2021	(657.236.935.101.822)
2022	(480.272.439.016.692)

sumber: LKPP 2018 – 2022 (diolah)

Pada tahun 2018, nilai Defisit-LO adalah sebesar Rp225,73 triliun. Sebesar 64,37% dari nilai tersebut merupakan defisit yang berasal dari Kegiatan Non Operasional pada Pos Kegiatan Non Operasional Lainnya, sedangkan sebesar 35,63% dari Defisit-LO tersebut berasal dari Defisit Operasional yang disebabkan karena nilai Beban Pemerintah yang lebih besar dari Pendapatan Pemerintah sesuai dengan kebijakan anggaran defisit.

Pada tahun 2018, nilai beban dari kegiatan non operasional lainnya cukup signifikan yang disebabkan oleh Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi dan Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya yang berasal dari beban atas adanya kewajiban Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan kepada PT AKR Corporation.

Kewajiban terhadap PT Pertamina (Persero) muncul akibat kekurangan pendapatan karena penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Solar Tahun 2017 dan 2018 sedangkan kewajiban Pemerintah kepada PT PLN (Persero) diakibatkan oleh penetapan tarif di bawah Biaya Pokok Penyediaan Listrik Non Subsidi. Atas nilai Defisit-LO sebesar Rp225,73 triliun ini, ekuitas Pemerintah di tahun 2018 turun sebesar Rp132,97 triliun.

Berbeda dengan tahun 2018, pada tahun 2019 meskipun nilai Defisit-LO meningkat menjadi Rp249,22 triliun, nilai ekuitas Pemerintah tidak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan Pemerintah melakukan penilaian kembali atas aset-aset yang dimiliki pada tahun 2017 dan 2018 sehingga nilai aset Pemerintah meningkat tajam di tahun 2019 yang berakibat pada naiknya ekuitas pemerintah. Walaupun ekuitas Pemerintah meningkat, Laporan Operasional Pemerintah tetap bernilai negatif dengan nilai defisit-LO sebesar Rp249,22 triliun. Nilai Defisit-LO ini disebabkan oleh Defisit Operasional dimana Pendapatan Operasional sebesar Rp2.168,93 triliun dan Beban Operasional sebesar Rp2.422,81 triliun. Beban Operasional di tahun 2019 meningkat signifikan dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar Rp2.249,59 triliun.

Pada tahun 2020 dan 2021 ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Pemerintah harus menghadapi pandemi ini dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi dampak pandemi baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian sehingga di tahun ini Pemerintah mengeluarkan beban operasional yang lebih besar. Hal ini berdampak pada meningkatnya nilai Defisit-LO pada tahun 2020 dan 2021. Nilai Defisit-LO yang sebelumnya sebesar Rp249,22 triliun pada tahun 2019 meningkat signifikan menjadi Rp872,61 triliun pada tahun 2020.

Defisit-LO ini selain disebabkan karena beban operasional pemerintah yang meningkat, juga disebabkan karena turunnya pendapatan yang diterima pemerintah selama tahun 2020. Penurunan pendapatan ini tidak terlepas dari melemahnya ekonomi Indonesia sebagai bagian dari dampak pandemi Covid-19.

Tidak berbeda jauh dengan tahun 2020, nilai Defisit-LO pada tahun 2021 juga masih cukup tinggi yaitu sebesar Rp723,16 triliun. Di tahun 2021 ini pendapatan operasional pemerintah meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebagai tanda mulai membaiknya perekonomian Indonesia, namun beban operasional di tahun 2021 juga masih tinggi dan meningkat dibandingkan dengan 2020 sehingga menghasilkan nilai Defisit-LO yang tinggi. Nilai Defisit-LO pada tahun 2020 dan 2021 ini mengakibatkan penurunan ekuitas yang paling signifikan secara nilai, dari nilai ekuitas sebesar Rp5.127,31 triliun pada tahun 2019 turun menjadi Rp4.473,19 triliun pada tahun 2020, dan menjadi Rp3.916,34 triliun pada tahun 2021 sehingga total selama 2 tahun ekuitas pemerintah turun hingga Rp1.210,97 triliun.

Pada tahun 2022, nilai Defisit-LO menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp511,45 triliun. Jika dibandingkan dengan Defisit-LO sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia, nilai Defisit-LO ini meningkat cukup besar. Pada tahun 2022 nilai Defisit Operasional menyumbang hanya 49,25% dari total Defisit-LO, sedangkan 50,75%-nya berasal dari Defisit Non Operasional. Menurunnya nilai Defisit Operasional

ini dipengaruhi oleh Pendapatan Operasional yang meningkat 30,41% dibandingkan dengan tahun 2021, terutama pendapatan yang berasal dari pendapatan perpajakan.

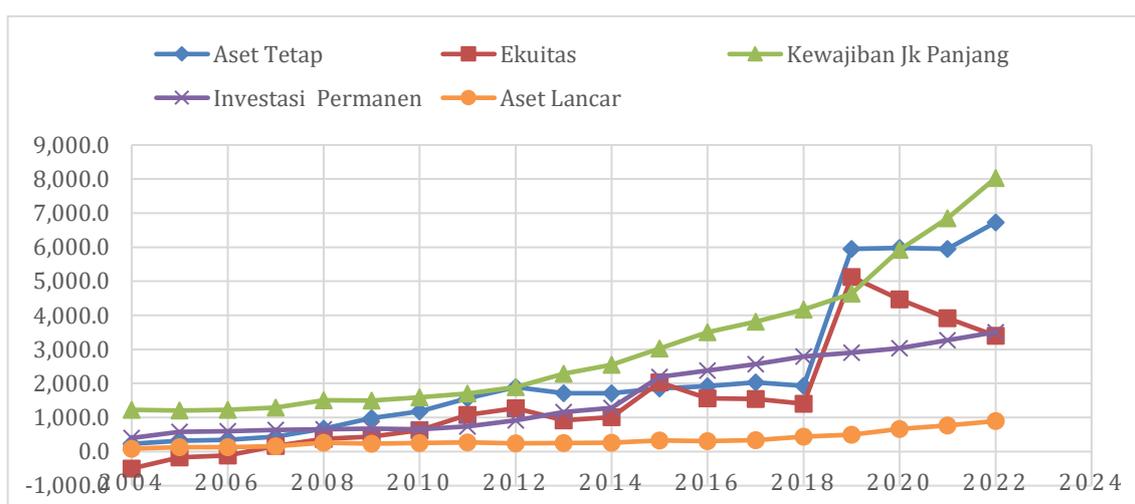
Sedangkan pada sisi Non Operasional, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2021 pada Beban Non Operasional yaitu Beban Pelepasan Aset Non Lancar dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Kenaikan yang signifikan dari Beban Pelepasan Aset Non Lancar disebabkan proses penghapusan aset serta realisasi hibah keluar aset, sedangkan kenaikan yang signifikan pada Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 berasal dari Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi akibat dari penurunan nilai tukar rupiah atas mata uang asing. Kecenderungan nilai Defisit-LO yang meningkat ini sejalan dengan penurunan ekuitas pemerintah.

Analisis Ekuitas dengan Pendekatan Neraca

Kenaikan atau penurunan ekuitas pemerintah pusat dalam neraca dapat disebabkan dari kenaikan atau penurunan berbagai pos lain dalam neraca (Pandowo & Kudhori, 2017). Untuk melakukan analisis penyebab kenaikan dan penurunan ekuitas dilakukan inventarisasi terlebih dahulu beberapa pos neraca dengan nilai signifikan yaitu Aset Tetap, Kewajiban Jangka Panjang, Investasi Permanen, dan Aset Lancar.

Terdapat dua alasan yang menjadi dasar pemilihan pos signifikan yang akan digunakan untuk analisis. Pertama, pos neraca tersebut bernilai signifikan. Kedua, berbagai pos tersebut juga dipilih karena digunakan dalam analisis struktur modal pada neraca sektor swasta sehingga diharapkan juga dapat diterapkan dalam melakukan analisis struktur modal sektor pemerintahan.

Pada Grafik 4 dapat dilihat bahwa kelima pos signifikan pada neraca mengalami kenaikan sejak tahun 2004 s.d 2022 dengan tingkat fluktuasi yang beragam. Untuk dapat mengetahui keterkaitan antara pos signifikan tersebut dengan kenaikan/penurunan ekuitas pemerintah, dilakukan analisis perbandingan tren kenaikan/penurunan ekuitas dengan masing-masing pos signifikan.



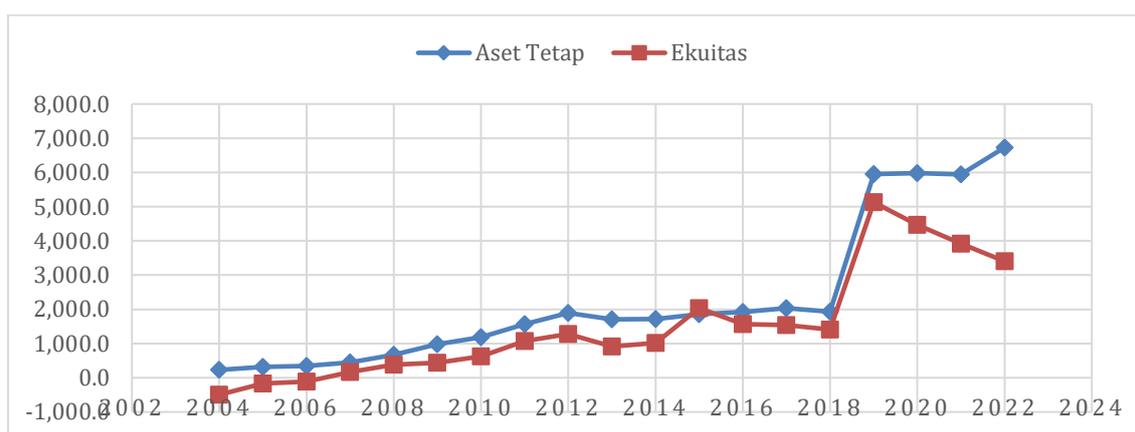
Grafik 4 Tren Pos Signifikan pada Neraca (triliun rupiah)

sumber: LKPP 2004 – 2022 (diolah)

Perbandingan Ekuitas dengan Aset Tetap

Grafik 5 menunjukkan bahwa Aset Tetap Pemerintah terus mengalami tren kenaikan signifikan. Sampai dengan tahun 2018, Aset Tetap mengalami tren kenaikan secara konsisten dari Rp229,1 triliun menjadi Rp1.931,1 triliun atau mengalami rata-rata kenaikan 17,9% per tahun. Seiring dengan kenaikan aset tetap, ekuitas juga mengalami kenaikan dari minus Rp497,2 triliun menjadi Rp1.407,8 triliun atau mengalami rata-rata kenaikan 48%. Pada tahun 2019 terdapat kebijakan Revaluasi Aset Tetap yang menyebabkan kenaikan sangat signifikan pada aset tetap dan ekuitas.

Nilai Aset Tetap naik 208,1% menjadi Rp5.949,6 triliun, diikuti dengan kenaikan ekuitas pemerintah yang naik menjadi Rp5.127,3 triliun atau naik 264% dari tahun sebelumnya. Setelah kebijakan Revaluasi Aset Tetap berakhir, mulai tahun 2020 s.d 2022 Aset Tetap mengalami rata-rata kenaikan 13,1% per tahun sedangkan Ekuitas pemerintah mengalami penurunan rata-rata 38% per tahun. Tren kenaikan ekuitas sebelum tahun 2019 sejalan dengan tren kenaikan nilai aset tetap, namun perbedaan tren antara ekuitas dengan aset tetap pada kurun waktu 2020 s.d. 2022 mengindikasikan bahwa penurunan ekuitas dapat disebabkan pos-pos lain dalam Neraca di luar Aset Tetap.



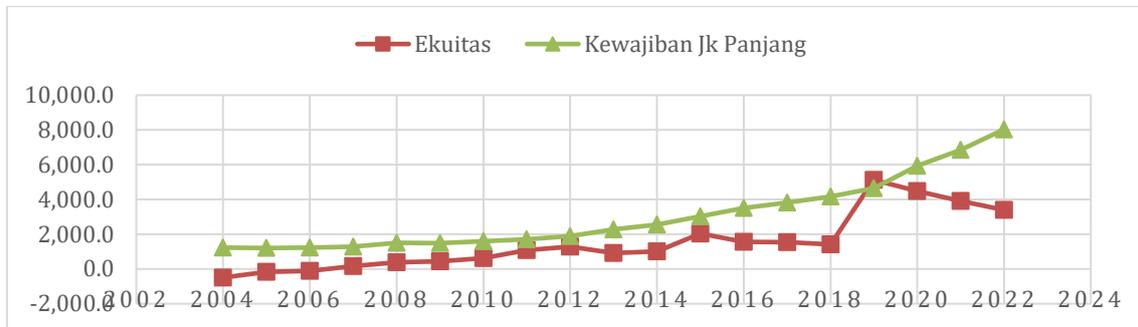
Grafik 5 Perbandingan Ekuitas dengan Aset Tetap
sumber: LKPP 2004 – 2022 (diolah)

Perbandingan Ekuitas dengan Kewajiban Jangka Panjang

Grafik 6 menunjukkan bahwa Kewajiban Jangka Panjang terus menunjukkan tren kenaikan signifikan sejak 2004. Sampai dengan tahun 2022, Kewajiban Jangka Panjang mengalami tren kenaikan secara konstan dari Rp1.223,2 triliun menjadi Rp8.028,3 triliun atau mengalami rata-rata kenaikan 11,3% per tahun. Kenaikan Kewajiban Jangka Panjang dilakukan untuk membiayai kebijakan ekspansif belanja APBN, salah satu contohnya ketika pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 Kewajiban Jangka Panjang naik 28% dari Rp4.635,5 triliun menjadi 5.923,9 triliun.

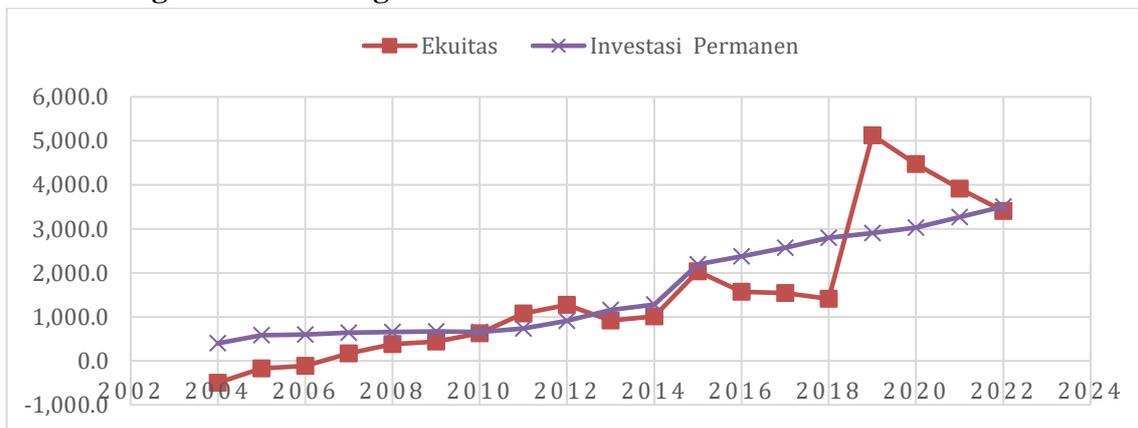
Pada periode tersebut ekuitas pemerintah mengalami penurunan 13%. Kondisi tersebut merupakan hal yang wajar ketika belanja ekspansif APBN ditutupi dengan pembiayaan melalui instrumen Kewajiban Jangka Panjang. Begitu juga pada tahun 2021-2022, Kewajiban Jangka Panjang meningkat dengan rata-rata 16% per tahun diikuti

dengan ekuitas yang mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan 13% per tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penurunan ekuitas disebabkan oleh kenaikan pada pos kewajiban jangka panjang.



Grafik 6 Perbandingan Ekuitas dengan Kewajiban Jangka Panjang

Perbandingan Ekuitas dengan Investasi Permanen



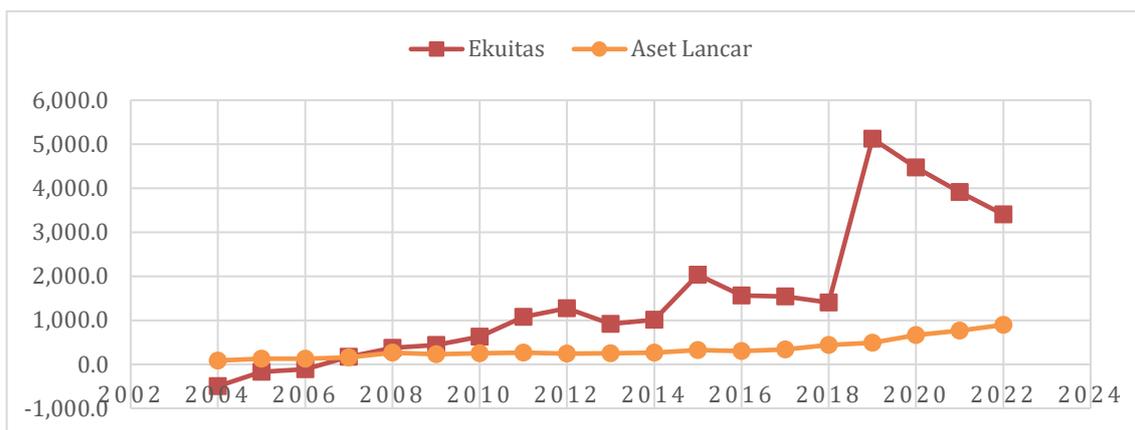
Grafik 7 Perbandingan Ekuitas dengan Investasi Permanen

sumber: LKPP 2004 – 2022 (diolah)

Pada Grafik 7 terlihat bahwa Investasi Permanen terus menunjukkan tren kenaikan signifikan sejak tahun 2004. Sampai dengan tahun 2022, Investasi Permanen mengalami tren kenaikan secara konstan dari Rp398,8 triliun menjadi Rp3.507 triliun atau mengalami rata-rata kenaikan 14% per tahun. Tren penurunan ekuitas sejak tahun 2020 s.d. 2022 berbanding terbalik dengan tren pada Investasi Permanen. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan ekuitas bukan disebabkan oleh perubahan pada Investasi Permanen.

Perbandingan Ekuitas dengan Aset Lancar

Grafik 8 menunjukkan bahwa Aset Lancar terus menunjukkan tren kenaikan sejak 2004. Sampai dengan tahun 2022, Aset Lancar mengalami tren kenaikan secara konstan dari Rp86,9 triliun menjadi Rp895,4 triliun atau mengalami rata-rata kenaikan 15,5% per tahun. Pada tahun 2020 s.d. 2022, Ekuitas terus menurun sedangkan Aset Lancar mengalami tren kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan ekuitas bukan disebabkan oleh perubahan pada Aset Lancar.



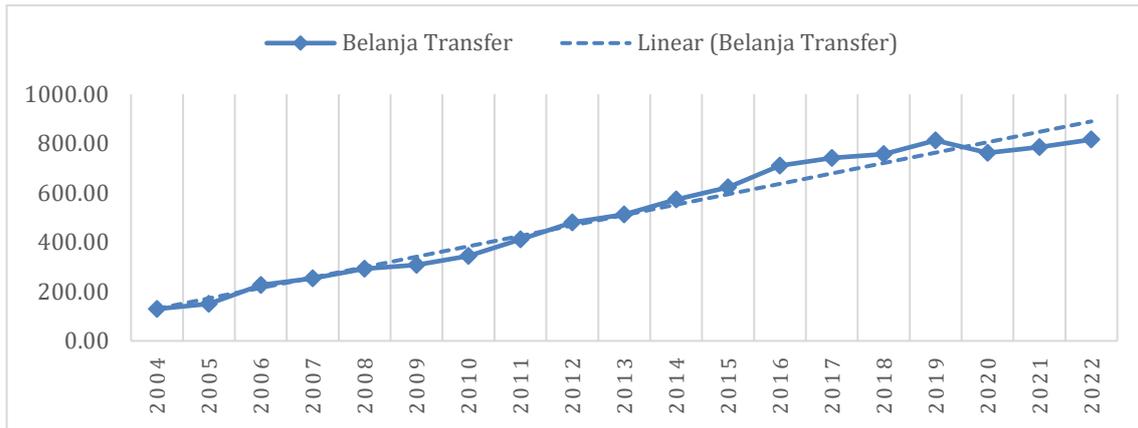
Grafik 8 Perbandingan Ekuitas dengan Aset Lancar
sumber: LKPP 2004 – 2022 (diolah)

Analisis Perbandingan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Analisis Ekuitas Pemerintah Pusat juga dilakukan dengan membandingkan dengan tren ekuitas pemerintah daerah konsolidasian dan juga ekuitas pemerintah konsolidasian antara pusat dan daerah. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa tujuan Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat yaitu untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah.

Grafik 9 menunjukkan tren kenaikan belanja transfer ke daerah sejak tahun 2004 dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 11,27%. Belanja transfer hanya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 yang turun 6,2% karena pandemi Covid. Belanja transfer kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 seiring dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.

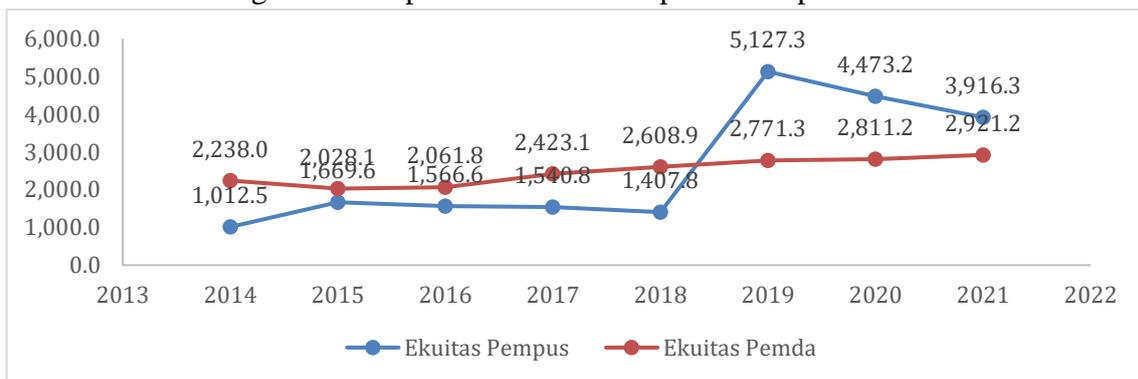
Belanja transfer ke Daerah akan menyebabkan berkurangnya ekuitas pada Pemerintah Pusat, akan tetapi belanja transfer tersebut akan dicatat sebagai Pendapatan Transfer di Daerah dan digunakan sesuai peruntukannya sehingga sebagian dari dana transfer tersebut akan menambah ekuitas di daerah, contohnya belanja transfer yang menghasilkan aset tetap seperti DAK Fisik.



Grafik 9 Belanja Transfer 2004 – 2022 (triliun Rupiah)

sumber: LKPP 2004 – 2022 (diolah)

Oleh karena itu dalam melakukan analisis ekuitas pemerintah pusat, diperlukan pula perbandingan dengan ekuitas pemerintah daerah sebagai konsekuensi adanya dana transfer. Perbandingan ekuitas pusat dan daerah dapat dilihat pada Grafik 10.



Grafik 10 Perbandingan Ekuitas Pemerintah Pusat dan Daerah 2014 – 2021 (triliun)

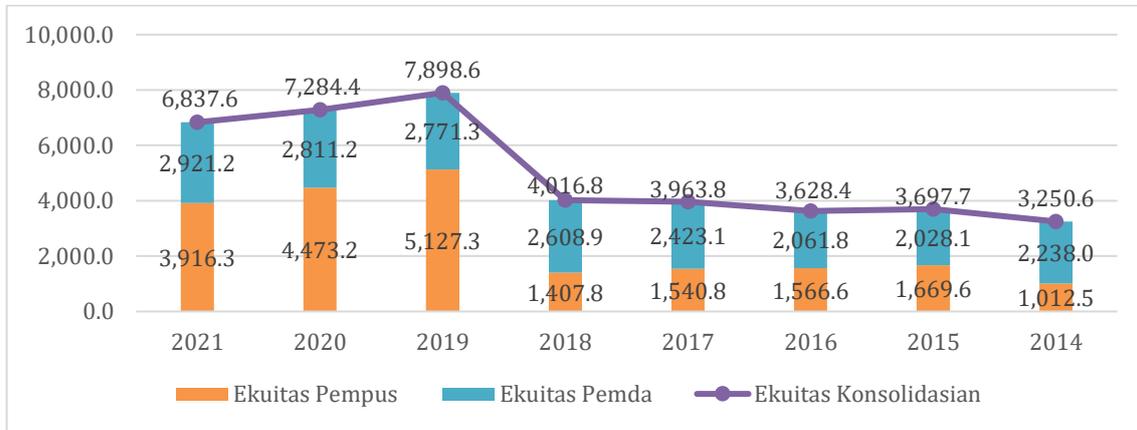
sumber: LKPK 2014 – 2021 (diolah)

Berdasarkan Grafik 10, perkembangan ekuitas Pemda terlihat lebih stabil. Sejak diterapkannya akuntansi akrual penuh pada tahun 2015, ekuitas Pemda terus mengalami kenaikan secara stabil dengan pertumbuhan rata-rata 4% per tahun. Pertumbuhan ekuitas yang stabil tersebut dikarenakan Pemda tidak memiliki nilai kewajiban jangka panjang dengan jumlah besar seperti yang dimiliki Pemerintah Pusat. Pada tahun 2021 jumlah kewajiban jangka panjang Pemda hanya sebesar Rp34,4 triliun atau hanya sebesar 1,2% proporsinya dibandingkan dengan ekuitas Pemda senilai Rp2.921,2 triliun.

Berbeda dengan pemerintah Pusat yang pada tahun 2021 memiliki kewajiban jangka panjang sebesar Rp6.844,9 triliun atau sebesar 174,8% dari ekuitas Pemerintah Pusat senilai Rp3.916,3 triliun. Di samping itu, Pemda juga tidak melakukan kewajiban revaluasi aset tetap sehingga tidak terjadi kenaikan aset dan ekuitas yang signifikan seperti yang dilakukan Pemerintah Pusat pada tahun 2019.

Adapun penurunan signifikan ekuitas pemerintah pada tahun 2020-2021 merupakan konsekuensi dari kebijakan belanja ekspansif Pemerintah Pusat dalam rangka

penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional dimana defisit APBN dibiayai dengan utang. Untuk mendapatkan gambaran secara lebih luas, pada Grafik 11 juga disajikan perkembangan ekuitas pemerintah konsolidasian yang merupakan konsolidasian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



Grafik 11 Ekuitas Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah 2014 – 2021 (triliun Rupiah)

sumber: LKPK 2014 – 2021 (diolah)

Berdasarkan Grafik 11, dapat dilihat bahwa ekuitas konsolidasian pusat dan daerah pada tahun 2019 s.d. 2021 memang tetap mengalami penurunan dengan tingkat penurunan rata-rata sebesar 7% per tahun. Namun penurunan tersebut tidak sebesar ketika ekuitas pemerintah pusat disajikan sendiri yaitu penurunan rata-rata 13% per tahun. Kondisi ini menunjukkan memang terdapat aliran ekuitas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana belanja transfer dari pemerintah pusat akan meningkatkan ekuitas pada pemerintah daerah.

Komparasi dengan Ekuitas Negara Lain

Kondisi penurunan ekuitas tidak hanya dialami Pemerintah Indonesia. Sejumlah negara lain juga memiliki tren penurunan ekuitas yang serupa, bahkan beberapa negara mengalami ekuitas atau net assets bersaldo negatif.

Tabel 3 Komparasi Ekuitas Indonesia dengan Negara Lain 2018 – 2022

Tahun	Australia (\$ billion)			Canada (\$ billion)		
	Total Assets	Liabilities	Net Assets	Total Assets	Liabilities	Federal Debt
2018	688,9	1.106,6	(417,8)	465,4	1.116,9	(671,2)
2019	737,3	1.281,9	(544,6)	499,7	1.185,2	(685,5)
2020	838,6	1.518,5	(679,9)	527,2	1.248,6	(721,4)
2021	1.000,1	1.753,4	(743,2)	603,5	1.652,2	(1.048,7)
2022	1.053,4	1.660,5	(607,2)	704,2	1.838,7	(1.134,5)
Tahun	USA (\$ billion)			Malaysia (RM billion)		

	<i>Total Assets</i>	<i>Liabilities</i>	<i>Net Assets</i>	<i>Total Assets</i>	<i>Liabilities</i>	<i>Net Assets</i>
2018	3.836,7	25.357,5	(21.520,8)	118,0	1.021,22	(903,23)
2019	3.992,0	26.944,8	(22.952,8)	126,15	1.080,13	(953,98)
2020	5.950,7	32.743,9	(26.796,3)	139,61	1.186,81	(1.047,20)
2021	4.893,6	34.777,7	(29.885,8)	146,91	1.297,82	(1.150,91)
2022	4.962,4	39.022,3	(34.061,2)			-
	Indonesia					
Tahun	(Rp Triliun)					
	Total Aset	Kewajiban	Ekuitas			
2018	6.325,28	4.917,47	1.407,81			
2019	10.467,53	5.340,22	5.127,31			
2020	11.098,67	6.625,47	4.473,19			
2021	11.454,67	7.538,32	3.916,34			
2022	12.325,45	8.920,55	3.404,89			

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa baik negara berkembang seperti Malaysia maupun negara-negara maju seperti Australia, Canada, dan USA juga mengalami penurunan ekuitas atau net worth selama empat sampai lima tahun terakhir. Di Australia rata-rata penurunan ekuitas selama empat tahun terakhir adalah sebesar 11,6%. Canada dan USA memiliki rata-rata penurunan ekuitas empat tahun terakhir sebesar 15,2% dan 12,2%, sedangkan Malaysia memiliki rata-rata penurunan ekuitas selama tiga tahun terakhir sebesar 8,4%. Rata-rata ini tidak jauh berbeda dengan rata-rata penurunan ekuitas Indonesia pada tiga tahun terakhir yaitu sebesar 12,76%.

Penurunan ekuitas suatu negara sangat berkaitan dengan nilai aset yang dimiliki negara tersebut dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pembiayaan yang digunakan. Negara-negara maju seperti Australia, Canada, dan USA cenderung memiliki nilai kewajiban yang tinggi sehingga sebagai konsekuensinya nilai ekuitas negara-negara tersebut pun turun sejalan dengan kewajiban yang dimiliki, bahkan memiliki nilai ekuitas negatif.

Meskipun mengalami tren yang sama dengan negara lain yaitu kewajiban yang meningkat dan ekuitas yang menurun, rasio Kewajiban terhadap PDB (Debt to GDP Ratio) Pemerintah Indonesia masih terjaga pada level aman karena masih di bawah batas 60% dari PDB yang ditetapkan Undang-Undang. Pada tahun 2022, rasio kewajiban terhadap PDB Indonesia sebesar 39,70%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 40,74%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kewajiban meningkat dan ekuitas pemerintah pusat menurun, PDB yang dihasilkan mengalami kenaikan yang lebih besar daripada kenaikan kewajiban dan pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan hati-hati dan tetap dijaga pada level yang aman.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2004 hingga 2022, terlihat adanya defisit dalam APBN yang disebabkan oleh kebijakan ekspansif pemerintah. Kebijakan ini melibatkan strategi perumusan dengan prinsip kehati-hatian dan terencana, terutama dalam kebijakan fiskal jangka menengah. Dampaknya mencakup

peningkatan pengeluaran pembiayaan untuk menutup defisit anggaran, terutama pada belanja operasional. Tren ini semakin terasa dalam tiga tahun terakhir sejak 2020, sebagai konsekuensi dari kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kebijakan defisit anggaran juga menyebabkan nilai negatif atau defisit pada Laporan Operasional setiap tahunnya, terutama pada tahun 2020 dan 2021 saat pandemi melanda, menjadi faktor utama penurunan ekuitas pemerintah. Analisis ekuitas dengan pendekatan neraca menunjukkan bahwa Aset Tetap dan Kewajiban Jangka Panjang mempengaruhi kenaikan atau penurunan ekuitas Pemerintah Pusat, dengan kebijakan yang menyebabkan kenaikan signifikan pada Aset Tetap meningkatkan ekuitas, sementara kenaikan pada Kewajiban Jangka Panjang, terutama selama penanganan pandemi, menurunkan ekuitas pemerintah.

Penyandingan ekuitas konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan gambaran menyeluruh mengenai aliran ekuitas pemerintah, dengan tren stabil pada konsolidasian Pemda dan fluktuatif pada pemerintah pusat. Tren penurunan ekuitas juga terjadi di berbagai negara, termasuk Australia, Canada, USA, dan Malaysia, menunjukkan bahwa tantangan keuangan tidak hanya dialami oleh Indonesia tetapi juga oleh negara-negara lain baik maju maupun berkembang.

BIBLIOGRAFI

- Adyanti, Nurul. (2020). *Studi Naratif Ekuitas Merek Iphone terhadap Kepercayaan Diri Sheeple*. Universitas Hasanuddin.
- Barry, Husnil. (2015). Analisis Spillover Terhadap Pasar Ekuitas Negara Berkembang Dan Negara Maju Periode 2003-2011. *Ekonomi & Bisnis*, 14(1).
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2016) Majalah Treasury Indonesia Tahun 2016 “Akuntansi Berbasis Akrua Kunci Laporan Keuangan Optimal”. Jakarta: Kemenkeu.
- Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (2022) Analisis dan Lesson Learned Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. Jakarta: Kemenkeu.
- Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (2022) Kajian Postur Ideal Neraca yang Sehat. Jakarta: Kemenkeu.
- Herwiyanti, Eliada, Sukirman, Sukirman, & Aziz, Fairuz Sufi. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 13–23.
- Kautsa, Reyhan. (2022). Tinjauan yuridis mengenai mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia). *SKRIPSI-2017*.
- Kuangan, Badan Pemeriksa. (2007). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. *Jakarta. Badan Pemriksa Keuangan Republik Indonesia*.
- Kementerian Keuangan (2015) Strategi Kebijakan Ekspansif/Kontraktif Dalam APBN Jangka Menengah. Jakarta: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Kementerian Keuangan (2004-2022) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004 – 2022 (Audited). Jakarta: Kemenkeu.

- Kementerian Keuangan (2014-2021) Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasi (LKPK) Tahun 2014 – 2021 (Audited). Jakarta: Kemenkeu.
- Kuspriyono, Taat. (2016). Pengaruh Ekuitas Merek, Kualitas Produk Dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Merek Samsung (Studi Kasus Mahasiswa/I Universitas Gunadarma). *Jurnal Komunikasi*, 7(1).
- Lestari, Ni Nyoman Sri Ayu, Bagia, I. Wayan, & Jana, Gede Putu Agus Susila. (2018). Pengaruh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24–33.
- Mole, Dance. (2015). Penerapan Akuntansi Ekuitas Dana pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3).
- Pandowo, Hedi, & Kudhori, Ahmad. (2017). Analisis Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Pemerintah Kota Madiun). *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 11(1), 85–96.
- Purwianti, Lily, & Zaman, Mehdar Badrus. (2017). Analisis Pengaruh Ekuitas Merek, Preferensi Merek, dan Harga Dengan Citra Negara Asal Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Minat Pembelian Laptop Oleh Mahasiswa Di Kota Batam. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 211–226.
- Putera, Roni Ekha. (2016). Pengelolaan keuangan daerah yang transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. *Sosiohumaniora*, 18(3), 253–262.
- Republik Indonesia (2003) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia (2010) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Siswajanthny, Farahdinny, Shiva, Khadizah Aliyah, Salsabila, Nashwa, Putry, Salsabila Afifany Susanta, & Putri, Silvia Maharani Iskandar. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4360–4369.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, Suwandi. (2022). Penyebab Ekuitas Negatif: Uji Signifikansi Pada Laba Bersih dan Nilai Utang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 216–225.
- Tholhah, Totoh, & Halim, Abdul. (2018). Analisis atas pembiayaan utang pada anggaran pendapatan dan belanja negara (Studi kasus tahun anggaran 2016). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(2).
- Yuniza, Mailinda Eka, & SH, L. L. M. (2021). *Hukum Administrasi Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Nas Media Pustaka.

Copyright holder:

Yulistria Anggraini, Muhammad Irfan Rizaldi, Haryo Adik (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

